



RENJA 2022

**DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja ini disusun dengan kesadaran penuh akan arti pentingnya Rencana Kerja sebagai pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2022 belum sempurna, oleh karena itu mohon kiranya saran atau masukan guna perbaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, kami menyampaikan terima kasih atas bantuannya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen guna pelaksanaan program dan kegiatan dimasa mendatang.

Rencana Kerja ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya visi misi Bupati Kebumen.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**

ttd

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dengan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
C. Isu-Isu Peyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	34
D. Review usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	37
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ..	68
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	70
C. Program dan Kegiatan	74
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	
BAB V. Penutup	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Dan Realisasi Capaian IKU Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021	9
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2020	9
Tabel 2.2	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	10
Tabel 2.3	IPM dan IPG Tahun 2016-2020	11
Tabel 2.4	Komposit Pembentukan IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020	12
Tabel 2.5	Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Tahun 2016-2020	12
Tabel 2.6	Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Menurut Tempat Kejadian Dan Lokasi Lembaga Kabupaten Kebumen 2016-2020	14
Tabel 2.7	Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	14
Tabel 2.8	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d tahun 2021 Kabupaten Kebumen	16
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2020	26
Tabel 2.10	Target dan Realisasi IKU Daerah 2020	27
Tabel 2.11	Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.12	Kegiatan Yang Terkait Dengan Penanggulangan Kemiskinan (Gulkin) Tahun 2020	27
Tabel 2.13	Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Kebumen	28
Tabel 2.14	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30
Tabel 2.15	Target dan Realisasi 2020 IKU OPD Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen	31
Tabel 2.16	Pencapaian Kinerja Bidang Sosial	32
Tabel 2.17	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2016-202	33
Tabel 2.18	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Kebumen	38
Tabel 2.19	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Kebumen	58
Tabel 2.20	Usulan Masyarakat	60
Tabel 3.1	Adapun Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai	

	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	71
Tabel 3.2	Prioritas Arah Tujuan Dan Sasaran Kebijakan Pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	72
Tabel 3.3	Program Dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2022	74
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	78
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	78
Tabel 3.6	Pencapaian SDGs	79
Tabel 3.7	Capaian SPM Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota..	84
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Uatama OPD tahun 2020 ..	85
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinsos dan P3A Kabupaten Kebumen	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Yang Mendukung Dinas Sosial Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021	10
Gambar 2.2	IDG Kabupaten Kebumen tahun 2017-2020	11
Gambar 2.3	Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan kabupaten kebumen tahun 2016-2020	13
Gambar 2.4	Realisasi dan target penanganan PMKS kebumen 2015-2020	30

LAMPIRAN

Berita Acara Forum PD 2021 Beserta lampirannya

Daftar Hadir Forum PD 2021

Notulen Forum PD 2021



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPTIASARI, SH., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2021**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja

Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja perangkat daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategi Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Tahun 2022 antara lain:

1. Substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah;
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan;
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholder*. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022.

Pembiayaan program pemulihan ekonomi, keringanan pajak merupakan insentif. Selain itu, alokasi anggaran yang disiapkan adalah untuk perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. Hal ini diamanatkan sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Hal ini dikarenakan dampak sosial, dampak ekonomi dengan adanya pandemi global *Covid-19*, tidak hanya dirasakan masyarakat miskin, tetapi masyarakat yang rentan miskin yang kedepannya akan menjadi miskin.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk memiliki Rencana Kerja (Renja PD) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloan dan tanggung jawab Keuangan Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
14. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990;
20. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
22. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
24. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
25. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2019 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
26. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

27. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
45. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2011 – 2031;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

2. Tujuan

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama tahun 2022.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
- E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan Dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kebumen mengemban tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kebumen melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Kebumen dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021. Berfokus dan berkomitmen dalam menurunkan angka kemiskinan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020 berdasarkan Laporan Kinerja Iinstansi Pemerintah.

Pencapaian indikator kinerja utama daerah (IKU Kabupaten), indikator angka kemiskinan pada tahun 2020 yakni sebesar 17,59% dari target 16,98%, mengalami kenaikan sebesar 0,77% dibanding dengan tahun 2019.

Table. 2.1

Target dan Realisasi Capaian IKU Angka Kemiskinan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021

Indikator sasaran (IKU Kabupaten)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka kemiskinan	Target (%)	20,20	19,26	18,05	17,74	16,98	16,22	15,45
	Realisasi (%)	20,20	19,86	19,60	17,47	16,82	17,59	-

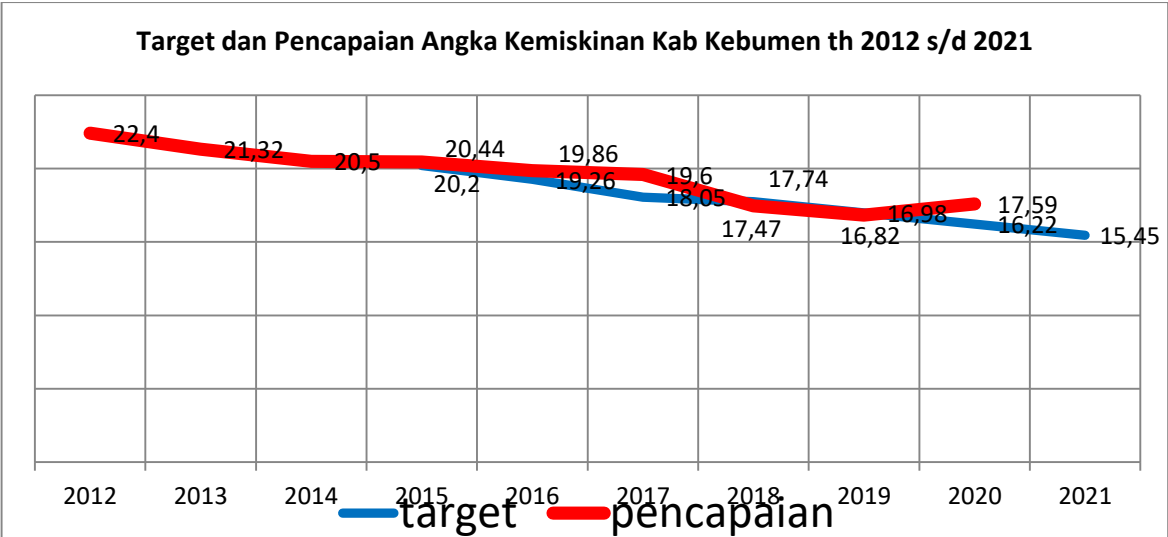
Tabel 2.2

Capaian indikator kinerja angka kemiskianan tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	Tahun 2020			Target akhr RPJMD	% Capaian terhadap Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian kinerja		
Angka kemiskinan	16,82%	16,22%	17,59%	92,21%	15,45%	87,83%

Grafik 2.1

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang mendukung Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021



Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan uoaya preventif, kuratif dan rehabilitative. Adapun cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perkembangan Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020

no	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	129	85	117	135	112
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	65	62	66	71	60
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	24	9	24	35	26
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	27	9	24	36	26
5	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2	2	2	4	0

Sumber : Dispermades P3A

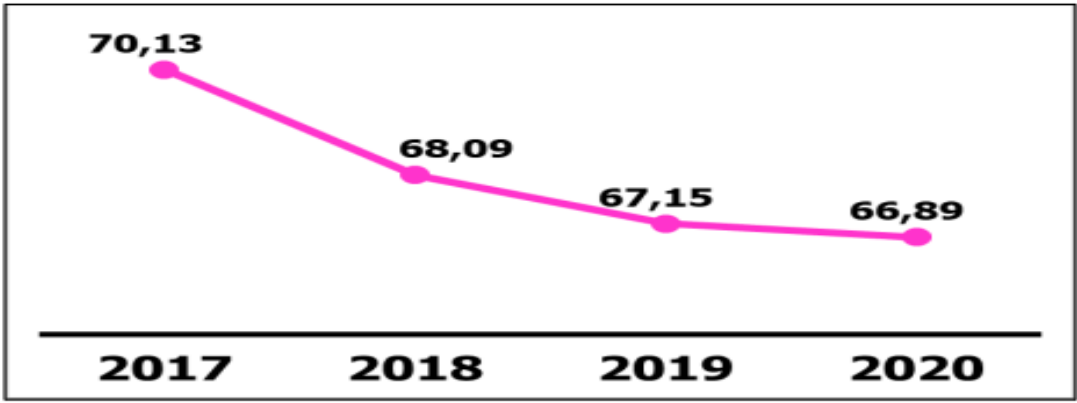
Dalam mengukur kesetaraan gender, terdapat beberapa indeks yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusi (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPD) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraa antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Pencapaian pembangunan gender antara lain terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi dalam juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.3
IPM dan IPG tahun 2016-2020

No	Indikator kinerja	capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67.41	68.29	68.8	69.60	69.81
	Laki-laki	n/a	72	72,49	73,15	73,39
	Perempuan	n/a	66,73	67,48	68,28	68,29
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	n/a	92,68	93,09	93,34	93,05

Indeks Pemberdayan Gender (IDG) menitikberatkan pada patisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG Kabupaten Kebumen mengalami penurunan pada periode 2017-2020 dari 70,13 di 2017 menjadi 66,89 pada 2020. Hal tersebut mengindikasikan ketimpangan gender di Kabupaten Kebumen semakin tinggi.

Gambar 2.2
IDG Kabupaten Kebumen tahun 2017-2020



Sumber: BPS, 2021

IDG terdiri dari tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non-pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan data perkembangan komposit IDG, ketimpangan gender terlihat menonjol pada kontribusi pendapatan perempuan dan keterlibatan perempuan pada pengambilan kebijakan.

Tabel 2.4
Komposit pembentukan IDG Kabupaten Kebumen
tahun 2017-2020

No	Indikator kinerja	capaian			
		2017	2018	2019	2020
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	28	24	22	22
2	Perempuan sebagai tenaga profesional (%)	46,71	45,53	49,12	54,20
3	Sumbangan pendapatan perempuan (%)	25,20	25,59	25,67	25,79

Sumber: BPS, Dispermades P3A

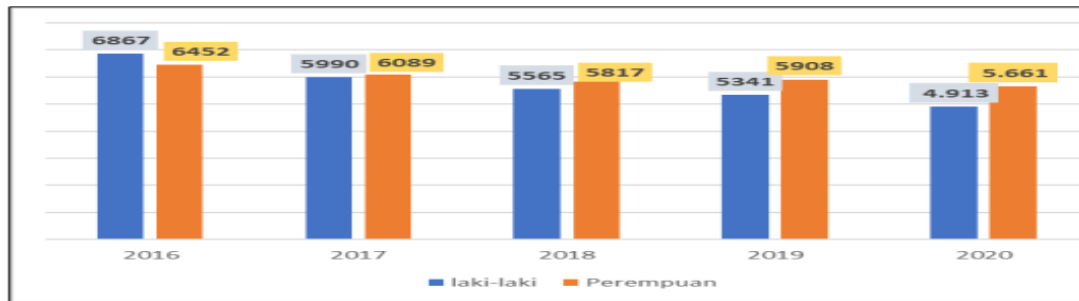
Di Kabupaten Kebumen upaya *affirmative action* dapat dilihat pada data keterwakilan perempuan dalam parlemen, dimana pada tahun 2017 keterwakilan perempuan dalam lembaga politik baru mencapai 28% dari keterwakilan perempuan dan parlemen dan menurun menjadi 26% pada 2018, serta pada tahun 2019 dan tahun 2020 menurun menjadi 22%.

Tabel 2.5
Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Variable	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-laki	36	26	34	34	39
2	Perempuan	14	14	13	12	11
	total	50	50	50	47	50

Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dari tahun 2016 – 2020 meningkat dari 48,44% menjadi 53,54%.

Gambar 2.3
Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan kabupaten
kebumen tahun 2016-2020



Sumber : data profil gender, dispermades P3A dan BKPPD

Tingginya angka kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kebumen baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak menjadi keprihatinan tersendiri. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, tetapi kasus kekerasan berbasis gender dan anak masih terjadi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan daerah tersebut juga dibentuk unit pelayanan terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 72 Tahun 2013 tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus Kekerasan terhadap Anak. Di dalam penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kebumen ditangani oleh P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan) yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana Harian yang terdiri dari lintas sektor termasuk di dalamnya pelibatan instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.6

Jumlah kekerasan berbasis gender dan anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan kabupaten kebumen 2016-2020

Lokasi Lembaga	Jumlah Korban / TKP	2016		2017		2018		2019		2020	
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
P2TP2A KARTIKA	Jumlah Korban	81	40	60	20	61	43	68	60	70	32
	Rumah Tangga	41	36	37	16	23	35	43	42	45	24
	Tempat Kerja	0	0	0	0	1	0	3	10	0	2
	Sekolah	16	0	0	0	15	0	8	0	8	1
	Fasilitas Umum	15	4	0	0	22	7	11	6	14	5
	Lainnya	17	0	14	1	0	1	3	2	3	0

Sumber: P2TP2A “KARTIKA” (Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak “Kebumen adil gender anti kekerasan”).

Dalam lima tahun terakhir jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 121 kasus di tahun 2016 menjadi 102 kasus di tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim P2TP2A Kartika.

Tabel 2.7

Kasus anak berhadapan dengan hukum
Kabupaten kebumen tahun 2016-2020

Jenis kasus AKH	2016	2017	2018	2019	2020	Kerangan
Fisik	6	3	8	0	3	Perkelahian, Pengeroyokan
Psikis	0	0	1	2	3	Perundungan, Pengancaman melalui HP
Pencurian	3	2	4	4	4	Pencurian Sepeda Motor, Bensin, HP, Rokok
Pembunuhan	0	0	0	1	0	Pembunuhan bayi baru lahir (di luar nikah)
Jumlah	9	5	13	7	10	

Sumber: P2TP2A KARTIKA, Dispermades

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum cukup memprihatinkan. Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2016–2020 meningkat 9 kasus menjadi 10 kasus. Kasus tersebut bervariasi mulai dari perkelahian dan perundungan sampai pencurian. Diperlukan komitmen pelaksanaan kebijakan yang benar-benar memperhatikan kepentingan dan kondisi masyarakat, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan

jiwa, penanganan dan pendampingan bagi korban kekerasan serta peningkatan ekonomi pemberdayaan perempuan.

Untuk mencapai sasaran kinerja cakupan penanganan PMKS melaksanakan berbagai program/kegiatan baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten. Program yang bersumber dari APBD meliputi :

1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya;
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
5. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;

Disamping dukungan beberapa program yang dibiayai APBD Kabupaten juga adanya Jaring Pengamanan Sosial (JPS) yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid, Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ini juga didukung adanya program Pemerintah Pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat terdampak Covid, serta adanya Program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) Provinsi.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020 dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2016-2021 sampai tahun 2020 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS PPKB) tahun 2021 (n+1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	
							Target Renja tahun 2020 (n)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
A			Program pendukung Operasional SKPD									
A	1		Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A	1	1	Penyedia jasa surat menyurat	jumlah bulan penyedia surat	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	83,33
		2	Penyediaan jasa komunikasi,	Jumlh bulan penyedia	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	83,33
			sumber daya air dan listrik	telekomunikasi air dan listrik								

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS PPKB) tahun 2021 (n+1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	
							Target Renja tahun 2020 (n)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan perawatan kendaraan dinas/operasional	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	83,33
		7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyedia jasa pengelola kegiatan	66 Bulan	44 bulan	11 bulan	11 bulan	100%	11 bulan	66 bulan	83,33
		8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyedia alat dan bahan kebersihan kantor	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	83,33
		9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan perbaikan peralatan kantor	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	83,33
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	83,33
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	83,33
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	83,33
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	83,33

[illegible]

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS PPKB) tahun 2021 (n+1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	
							Target Renja tahun 2020 (n)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
B	15		Program pemberdayaan Fakir miskin, komunitas Adat terpencil (KAT) dan penyanggah masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya	Jumlah Fakir miskin, KAT, dan PMKS yang diberdayakan	Prosentase Fakir Miskin yang diberdayakan	80%						
	15	1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah peserta Rakor pendamping dan Operator PKH	1.812 org	1.047 orang	258 orang	258 Org	100	249 Org	1.554 Org	85,76
	15	3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah KK miskin yang diberdayakan	30.000 KK	372 KK	2.988 KK	2.988 KK	100	50 KK	3.410 KK	11,36
	15	5	Pelatihan ketrampilan bagi penyanggah masalah kesejahteraan sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang diberi bantuan	435 Org	223 org	70 org	70 org	100	55 org	348 orang	80
	15		Program penataan Administrasi Kependudukan	Teridentifikasinya data Kependudukan								
	15	8	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah dokumen data base kependudukan	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	5 Dok	83,33

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS PPKB) tahun 2021 (n+1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	
							Target Renja tahun 2020 (n)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi masalah sosial	Banyaknya orang yang terlayani dan terehabilitasi kesejahteraan sosialnya; banyaknya fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.676 orang							
	16	4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan	851 orang	414 orang	140 orang	140 orang	100 orang	50 orang	604 orang	70,97
	16	5	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam/bencana sosial yang diberikan bantuan	675 orang	150 orang	125 orang	125 orang	100	1.000 orang	1.275 orang	188
	16	7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS (ODGJ) yang di layani	150 org	-	50 org	50 org	100	30 orang	80 orang	53,33
	16	16	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data base PMKS dan PSKS (non kemiskinan)	5 Dokumen	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	4 Dok	80
	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah anak nakal,penyandang cacat, dan eks trauma yang terbina								

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS PPKB) tahun 2021 (n+1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	
							Target Renja tahun 2020 (n)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	18	4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat terlantar yang diberikan bantuan	1.205 orang	337 Org	200 Org	200 Org	100	175 orang	712 orang	59,08
	19		Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Meningkatnya pembinaan panti asuhan/panti jompo								
	19	4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti/jompo yang menerima bantuan	3.900 orang	150 orang	1.250 org	1.250 org	100	-	1.400 orang	35,89
	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks Narapidana dan penyandang sosial lainnya								
	20	1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah PGOT yang diberikan bantuan	409 orang	184 orang	70 orang	70 orang	100	50 orang	304 orang	74,32
	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah anggota kelembagaan PMKS yang diberdayakan								
	21	1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan UEP bagi anggota veteran/perintis kemerdekaan dan keluarga nya (orang)	120 orang	60 orang	20 orang	20 orang	100	-	80 orang	66,66

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS PPKB) tahun 2021 (n+1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	
							Target Renja tahun 2020 (n)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		2	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pengurus ORSOS dan panti asuhan, pelaku usaha kesejahteraan sosial yang di koordinasi	214 orang	93 orang	36 orang	36 orang	100	-	129 orang	60,28
		3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang dibina	580 orang	317 orang	76 Org	76 Org	100	50 orang	443 orang	76,37
C			Urusan wajib bukan pelayana dasar									
C	15		Pengendalian penduduk dan keluarga berencana									
	15		Program keluarga berencana	Peningkatan pelayanan KB di Kecamatan								
	15	1	Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontraepsi bagi keluarga miskin		26 Kec	-	26 Kec	26 Kec	100	26 Kec	26 Kec	100
	15	2	Pelayanan KIE	Pelayanan KIE	26 Kec	26 kec	26 kec	26 kec	100	26 kec	26 Kec	100
	15	3	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	Terciptanya kesadaran masyarakat terutama remaja dalam merencanakan keluarga	450 Orang	80 org	450 org	450 org	100	-	530 orang	117,77
	15	7	Pembinaan petugas keluarga berencana	Jumlah kader PPKBD, sub PPKBD dan petugas pencatatan dan pelaporan KB yang di bina	11.208 Org	2.647 Org	2.187 Org	2.187 Org	100	2.187 Org	7.021 Org	62,64

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS PPKB) tahun 2021 (n+1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	
						Target Renja tahun 2020 (n)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
15	9	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang di adakan	40 paket	2 paket	6 paket	6 paket	100	40 paket	48 paket	120
15	10	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah lokasi kampung KB yang di fasilitasi	130	26 kec	26 kec	26 kec	100	26 lokasi	26 kec	100
15	12	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	Jumlah remaja dan masyarakat peserta sosialisasi	2.000 orang	182 orang	750 orang	750 orang	100	750 orang	1.682 orang	84,1
17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan pelayanan KB aktif								
17	2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah calon akseptor KB yang dilayani	814.327 orang	87.459 orang	162.816 orang	162.816 orang	100	162.891 org	413.166 orang	50,73
	4	Pelayanan KB medis operasi	Jumlah peserta yang terlayani KB MOW dan MOP	863 orang	371 orang	200 orang	200 orang	100	-	571 orang	66,16
23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pemberdayaan kader kelompok Tribina								
23	2	Pemberdayaan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan bina lembaga keluarga	Jumlah kader BKB, BKR, BKL, dan BLK yang dibina	661 kelompok	312 kelompok	125 kelompok	125 kelompok	100	130 kelompok	567 kelompok	85,77

[illegible]

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS PPKB) tahun 2021 (n+1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2021	
							Target Renja tahun 2020 (n)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	15		Program pengembangan data/informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah								
	15	2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumla dokumen perencanaan yang disusun	29 dok	14 dok	5 dok	5 dok	100	6 dok	27 dok	82,75
	23		Program Perencanaan Sosial Budaya	Prosentase dokumen data kemiskinan yang disusun	100%	-						
	23	12	Penyusunan Data Kemiskinan	Jumlah dokumen Data kemiskinan yang disusun	3 Dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	66,66
G			Kepegawaian pendidikan, dan pelatihan									
	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terfasilitasinya aparatur pemerintahan sejak perekrutan, penempatan, pengembangan karier sampai dengan penghargaan prestasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	30	1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah ASN/Fungsional PKB yang dibina	375 orang	75 orang	56 orang	56 orang	100 orang	49 orang	180 orang	53,06

Realisasi keuangan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2020 adalah 94,13% dari total anggaran Rp.15.937.287.000,-. Anggaran dan realisasi per jenis belanja tersaji sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Keuangan
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.908.423.000	4.376.680.975	89,16
	a. Belanja pegawai	4.908.423.000	4.376.680.975	89,16
2	Belanja Langsung	15.937.287.000	15.002.911.756	94,13
	a. Belanja barang	14.610.675.000	13.828.522.629	94,64
	b. Belanja peralatan dan mesin	1.326.612.000	13.828.522.629	88,52
	Jumlah Belanja SKPD	20.845.710.000	19.379.592.731	92,96

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

1) Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fasilitasi pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Fasilitas dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial;
- c. Pemberian dukungan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional (TMPN);
- d. Penanganan bencana melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiaga -an penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH);
- f. Pembinaan dan pengembangan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- g. Pemberian izin undian dan pengumpulan sumbangan sosial;
- h. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
- i. Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT);
- j. Pemberdayaan terhadap keluarga miskin melalui usaha ekonomis produktif (perseorangan atau kelompok);

- k. Pembinaan dan penilaian terhadap organisasi sosial kemasyarakatan/yayasan;
- l. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Beberapa upaya telah dilakukan Kabupaten Kebumen untuk menekan angka kemiskinan namun butuh usaha lebih keras di tahun 2021-2026 untuk mengatasi kemiskinan di Kebumen. Kemiskinan di Kebumen sampai tahun 2020 sebesar 17,59%, angka ini bila dibandingkan dengan target RPJMD 2016-2021 sudah diatas target, dimana target RPJMD tahun 2020 sebesar 16,22%. Namun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di Kabupaten tetangga, Jawa Tengah dan Nasional angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen tercatat paling tinggi se Jawa Tengah.

Adapun capaian IKU Daerah:

Tabel 2.10

Target dan Realisasi IKU Daerah 2020

IKU Daerah	Target 2020	Realisasi 2020
Angka Kemiskinan	16,22 %	17,59%

Sumber: Data BPS diolah

Tabel 2.11

Profil potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020

No	Indikator kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM)	98	98	98	71	93
2	Jumlah tagana	11	11	11	45	50
3	Jumlah pendamping PKH	162	146	239	245	257

Tabel 2.12

Kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan (gulkin) tahun 2020

NO	KEGIATAN	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	KUBE 50 KK	137.801.000
2	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Pelatihan ketrampilan untuk 130 orang	154.178.000
3	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks truma	Pemberian alat bantu untuk 287 orang penyandang cacat berat	298.590.000
4	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Pemberian bantuan barang untuk 50 orang (WRSE)	131.740.000

Total anggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2020 sebesar Rp 4.988.985.000 atau 29,61% dari total belanja APBD Tahun 2020.

Selain permasalahan kemiskinan, permasalahan PMKS menjadi permasalahan tersendiri mengingat tingginya jumlah PMKS dan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13
Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
Kabupaten Kebumen

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penanganan PMKS	14,93%	17,69%	27,14%	67,25%	70,65%	96,12%
2.	Jumlah PMKS yang ditangani	31.393	35.151	51.970	119.282	450.840	615.792
3.	Jumlah PMKS	210.208	198.651	191.430	195.564	638.092	640.654

2) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Fasilitas dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial;
- c. Pemberian dukungan usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) antara lain penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, eks warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan human immuno deficiency virus (HIV)/ acquired immuno deficiency syndrome (AIDS) dan pekerja seks komersial (PSK), orang terlantar;
- d. Penanganan terhadap eks korban penyalahgunaan narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lain;
- e. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- f. Pemeliharaan anak terlantar termasuk penanganan proses adopsi anak;
- g. Penanganan lanjut usia melalui sistem panti dan non panti;
- h. Pemberian bantuan kepada orang terlantar/kehabisan bekal berdasarkan laporan dari kepolisian;
- i. Pengawasan penempatan pekerja sosial non fungsional panti sosial swasta; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sementara itu, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah Tagana menjadi 50 orang pada tahun 2020 dan jumlah pendamping PKH menjadi 257 orang pada tahun 2020, jumlah PSM mengalami kenaikan menjadi 93 orang pada tahun 2020. Keberadaan PSKS diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen lebih baik. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dimiliki masih belum cukup untuk menangani keseluruhan masalah sosial yang ada di Kabupaten Kebumen. Sinergitas semua stakeholder terkait, dan aksi kolaboratif menjadi salah satu kunci

keberhasilan penanganan masalah sosial. Profil PSKS di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelatanaan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota menyebutkan bahwa Standar pelayanan pada SPM Sosial di Kabupaten Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

PMKS menjadi sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Selain juga, memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatanan hidup masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

SPM tersebut juga mengamanatkan adanya pusat kesejahteraan sosial yang memiliki paling sedikit satu orang relawan sosial yang tersertifikasi. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan Bersama, tenaga pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan. SPM bidang sosial juga mengatur mengenai pengumpulan dan pengelolaan data sosial. Perlunya ada semacam sistem layanan rujukan terpadu sebagai pusat data, informasi dan pelayanan dalam upaya pemenuhan SPM sosial. Jika melihat ketersediaan PSKS masih belum mencukupi layanan pemenuhan SPM sosial dengan optimal. Selain itu PSKS seringkali bertugas ganda sebagai pengumpul dan pengelola data. Keterbatasan ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan SPM bidang Sosial

Penanganan bidang sosial di Kebumen berfokus pada Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diselenggarakan melalui penanganan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 yang membagi kewenangan penanganan PMKS, sesuai peraturan tersebut kewenangan Kebumen menangani PMKS hanya yang ada di luar panti. Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS

non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana di Kebumen. Sedangkan program rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS. Salah satu Indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama dalam cakupan penanganan PMKS dari tahun ke tahun Capaian indikator Kinerja Penanganan PMKS Tahun 2020 telah melampaui target RPJMD 2016-2021.

Gambar 2.4

Realisasi dan Target Penanganan PMKS Kebumen 2015-2020



Sumber: Dinsos BPKB. Kab. Kebumen, 2020.

Jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi PMKS. Pada tahun 2016 PMKS yang tertangani 17,69% dari jumlah PMKS yang ada dan tahun 2020 meningkat 96,12% dari PMKS. Pendataan PMKS telah diintegrasikan dengan basis data kesejahteraan sosial dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Adapun tabel perkembangan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 2.14

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak jalanan		47	66	80	86	130
2	ODGJ	3.898	3.999	4.180	4.385	4.383	4283
3	Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)	469	462	456	451	443	122
4	Fakir miskin	-	182.827	185.648	186.931	648.030	185.786
5	Anak terlantar	509	591	662	875	1.265	1.831
6	Lanjut usia terlantar	23.449	23434	23.404	23.380	23.348	23.348
7	Penyandang Disabilitas	-	2.887	8.379	9.204	11.043	10.842
9	Bekas narapidana	125	182	156	106	173	173

Sumber : Dinsos PPKB Kab. Kebumen,2020

Capain IKU Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2020 sebesar 96,12%, angka ini telah melampaui target Renstra 2016-2021 yakni sebesar 16,20%. Angka ini diperoleh dari jumlah PMKS yang ditangani sejumlah 615.792 jiwa dibagi jumlah PMKS dalam DTKS sejumlah 640.654 jiwa.

Tabel 2.15
Target dan Realisasi 2020 IKU OPD Dinas Sosial dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

No	IKU OPD	Taget 2020	Realsiasi 2020
1	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	16,20%	96,12%
2	Cakupan Peserta KB Aktif	85,10%	70,60%
3	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	32,27%	44,04%

Sumber : Dinsos PPKB, 2020

Tabel 2.16
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial

No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
	Bidang Sosial	√										
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%		100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%		100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	100%		100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	100%		100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	

3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. fasilitasi kesetaraan gender di bidang politik, hukum pertahanan, keamanan, ekonomi (industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, ekonomi kreatif, pertanian, kelautan, dan perikanan), pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga, infrastruktur, lingkungan dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penyusunan data terpilah di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak serta peningkatan kualitas keluarga;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga;
- d. fasilitasi perlindungan hak perempuan dan anak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus, dan tindak pidana perdagangan orang;
- e. fasilitasi perlindungan anak dari kekerasan, perlindungan khusus, pemenuhan hak anak serta peningkatan kualitas hidup anak;
- f. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adapun cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2.17

Perkembangan Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten kebumen tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	129	85	117	135	112
2	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	65	62	66	71	60
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	24	9	24	35	26
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	27	9	24	36	26
5	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2	2	2	4	0

Sumber: Dispermades P3A, 2021

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdapat kondisi permasalahan dan hambatan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 permasalahan dan isu strategis untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Permasalahan urusan Bidang Sosial :
 - a. Angka kemiskinan masih tinggi;
 - b. Validitas DTKS masih rendah;
 - c. Tingginya populasi PMKS;
 - d. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
2. Permasalahan berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - a. Indeks Development Gender (IDG);
 - Jumlah anggota perempuan di parlemen 30%, kebumen 22%;
 - Pendapatan perempuan dalam keluarga masih rendah (pendataan dari BPS)
 - Peran Perempuan yang terlibat dalam manajerial di pemerintah daerah masih rendah
 - b. Masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak;
 - c. Prosentase analisa GAP dan GBS untuk OPD masih rendah;
 - d. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen;
 - e. Belum optimalnya peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Kebumen;
 - f. Pengumpulan data pilah gender dari OPD yang belum tepat waktu;
 - g. Masih perlunya peningkatan capaian indikator untuk menuju Kabupaten Layak Anak;
 - h. Masih rendahnya jumlah pembentukan Forum Anak ditingkat Desa/Kelurahan;
 - i. Belum optimalnya fasilitas kesehatan yang ramah anak;
 - j. Masih rendahnya sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa yang akan datang maka harus diidentifikasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi masa yang akan datang. Tantangan yang sedang dan akan dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain adalah:

- a. Tingginya populasi PMKS yang disebabkan tingginya angka kemiskinan;
- b. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan;
- c. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan;
- d. Rendahnya kemandirian dan produktifitas penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- e. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, sarana prasarana serta Program dan kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan;
- f. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- g. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- h. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
- i. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislative perempuan;
- j. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat sertapartisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- k. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- l. Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
- m. Kuatnya budaya di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- n. Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- o. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- p. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;

- q. Adanya disharmoni antar Undang-Undang terkait anak, seperti batas usia anak dalam UU Perkawinan adalah 16 tahun, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak batas usia anak adalah 18 tahun;
- r. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- s. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan kinerjanya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instansi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota;
- c. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- d. Banyaknya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- f. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- g. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- h. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
- i. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- j. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengembangan tingkat Kecamatan dan Desa;
- k. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;

- l. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- m. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- n. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- o. Adanya kerjasama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
- p. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- q. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun isu strategi yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan anatar sektor;
2. Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan DTKS oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;
3. Masih kurang optimalnya potensi sumber kesejahteraan sosial dan Lembaga kesejahteraan sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial.
4. Belum optimalnya pelaksanaan Keadilan dan kesetaraan gender
5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, Rencana Kerja Kelembagaan Pusat, Program Strategis Nasional, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Rencana kerja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan Teknokratis dan Partisipatif.

Tabel 2.18
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
I	Program Pemberdayaan Sosial	Kabupaten Kebumen	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	69%	377.719	Program Pemberdayaan Sosial	Kabupaten Kebumen	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	69%	377.719	
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan	377.719	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan	377.719	
1)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kebumen	jumlah TKSK yang diberdayakan	26 Orang	309.592	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kebumen	jumlah TKSK yang diberdayakan	26 Orang	309.592	
2)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kabupaten kebumen	jumlah anggota karang taruna yang diberdayakan	21 Orang	45.046	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kabupaten kebumen	jumlah anggota karang taruna yang diberdayakan	21 Orang	45.046	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota					Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota					
3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten Kebumen	jumlah anggota LK3 yang diberdayakan	20 Orang	23.081	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten Kebumen	jumlah anggota LK3 yang diberdayakan	20 Orang	23.081	
B	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kabupaten Kebumen	Prosentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100%	20.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kabupaten Kebumen	Prosentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100%	20.000	
2	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Kabupaten Kebumen	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di pulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	10 Orang	20.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Kabupaten Kebumen	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di pulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	10 Orang	20.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Desa/Kelurahan Asal					Desa/Kelurahan Asal					
4)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan keDesa/Kelurahan Asal	Kabupaten kebumen	Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	10 Orang	20.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan keDesa/Kelurahan Asal	Kabupaten kebumen	Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	10 Orang	20.000	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Kebumen	Prosentase jumlah PMKS terlantar yang tertangani	100%	3.259.814	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Kebumen	Prosentase jumlah PMKS terlantar yang tertangani	100%	3.259.814	SPM Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	1.840 org	2.332.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	1.840 org	2.332.000	SPM Sosial

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5)	Penyediaan Permakanan	Kabupaten kebumen	jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan	1.170 Orang	1.695.000	Penyediaan Permakanan	Kabupaten kebumen	jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan	1.170 Orang	1.695.000	
6)	Penyediaan sandang	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan	270 org	100.000	Penyediaan sandang	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan	270 org	100.000	
7)	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu	160 org	130.000	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu	160 org	130.000	SPM Sosial
8)	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten kebumen	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	140 Orang	300.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten kebumen	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	140 Orang	300.000	
9)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Kebumen	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	50 Orang	37.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Kebumen	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	50 Orang	37.000	
10)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan	50 Orang	70.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan	50 Orang	70.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
4	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kabupaten Kebumen	jumlah tuna susila, bekas narapidana, keluarga bermasalah sosial psikologi, pekerja migran,dan WRSE yang tertangani	5 keg	927.814	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kabupaten Kebumen	jumlah tuna susila, bekas narapidana, keluarga bermasalah sosial psikologi, pekerja migran,dan WRSE yang tertangani	5 keg	927.814	
11)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	45 Orang	20.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	45 Orang	20.000	
12)	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan (ODGJ) (Mbah Marsiyo 15 orang, Rumah Singgah Dosaraso 120 orang, Surotrunan 15 orang, Sawangan Alian 15 orang, WRSE 80 orang)	245 Orang	502.427	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan (ODGJ) (Mbah Marsiyo 15 orang, Rumah Singgah Dosaraso 120 orang, Surotrunan 15 orang, Sawangan Alian 15 orang, WRSE 80 orang)	245 Orang	502.427	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
13)	Penyediaan Sandang	Rumah Singgah Dosaraso Kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso)	120 Orang	100.000	Penyediaan Sandang	Rumah Singgah Dosaraso Kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso)	120 Orang	100.000	
14)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rumah Singgah Dosaraso Kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso)	120 Orang	225.387	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rumah Singgah Dosaraso Kebumen	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso)	120 Orang	225.387	
15)	kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabsos	Kabupaten Kebumen	Jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang difasilitasi	3 lembaga	80.000	kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabsos	Kabupaten Kebumen	Jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang difasilitasi	3 lembaga	80.000	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten kebumen	cakupan perlindungan jaminan sosial	75,75%	1.105.970	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten kebumen	cakupan perlindungan jaminan sosial	75,75%	1.105.970	
5	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten kebumen	Jumlah dokumen data Kemiskinan	26 Dokumen	605.970	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten kebumen	Jumlah dokumen data Kemiskinan	26 Dokumen	605.970	
16)	Fasilitasi bantuan sosial	Kabupaten kebumen	jumlah KK penerima	50000 jiwa	500.000	Fasilitasi bantuan sosial	Kabupaten kebumen	jumlah KK penerima	50000 jiwa	500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	kesejahteraan keluarga		Kartu Keluarga Sejahtera			kesejahteraan keluarga		Kartu Keluarga Sejahtera			
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kabupaten Kebumen	ProsentaseKorban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.860.879	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kabupaten Kebumen	ProsentaseKorban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.860.879	
6	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten kebumen	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	5 kegiatan	1.492.500	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten kebumen	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	5 kegiatan	1.492.500	SPM Sosial
17)	Penyediaan Makanan	Kabupaten Kebumen	jumlah paket penyediaan makanan bagi korban bencana	1000	200.000	Penyediaan Makanan	Kabupaten Kebumen	jumlah paket penyediaan makanan bagi korban bencana	1000	200.000	
18)	Penyediaan Sandang	Kabupaten Kebumen	jumlah paket penyediaan sandang bagi korban bencana	150 org	92.500	Penyediaan Sandang	Kabupaten Kebumen	jumlah paket penyediaan sandang bagi korban bencana	150 org	92.500	
19)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupaten Kebumen	jumlah paket penyediaan tempat	3 Paket	850.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupaten Kebumen	jumlah paket penyediaan tempat	3 Paket	850.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			penampungan pengungsi					penampungan pengungsi			
20)	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Kebumen	jumlah kelompok rentan korban bencana alam dan sosial yang tertangani	2 Kelompok	250.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Kebumen	jumlah kelompok rentan korban bencana alam dan sosial yang tertangani	2 Kelompok	250.000	
21)	pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten kebumen	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	500 Orang	100.000	pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten kebumen	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	500 Orang	100.000	
VII	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	2 Kegiatan	368.379	Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	2 Kegiatan	368.379	
22)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Kebumen	Jumlah Kampung siaga bencana yang difasilitasi	4 lokasi	200.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Kebumen	Jumlah Kampung siaga bencana yang difasilitasi	4 lokasi	200.000	
23)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Kebumen	jumlah Taruna siaga bencana yang diberdayakan	50 Orang	168.379	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Kebumen	jumlah Taruna siaga bencana yang diberdayakan	50 Orang	168.379	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN	Kabupaten Kebumen	Jumlah TMP yang dikelola	1 TMP	14.400	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN	Kabupaten Kebumen	Jumlah TMP yang dikelola	1 TMP	14.400	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	MAKAM PAHLAWAN					MAKAM PAHLAWAN					
8	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	JumlahTMP yang dipelihara	1 TMP	14.400	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	JumlahTMP yang dipelihara	1 TMP	14.400	
24)	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah orang pengaman TMP	1 Orang	14.400	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah orang pengaman TMP	1 Orang	14.400	
VII	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kabupaten Kebumen	'Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3 kegiatan	312.531	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kabupaten Kebumen	'Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3 kegiatan	312.531	
9	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	59 instansi	54.314	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	59 instansi	54.314	
10)	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada	2 keg	258.217	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada	2 keg	258.217	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Kewenangan Kabupaten/Kota		Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
8	Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Cakupan Perlindungan Perempuan	100%	263.935	Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Cakupan Perlindungan Perempuan	100%	263.935	
11	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 keg	42.190	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2 keg	42.190	
27)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup	Kabupaten Kebumen	Jumlah dokumen kerjasama linsektor pencegahan kekerasan/TPPO	9 dok	42.190	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah dokumen kerjasama linsektor pencegahan kekerasan/TPPO	9 dok	42.190	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Daerah Kabupaten/Kota										
12	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	2 keg	221.745	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	2 keg	221.745	
28)	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah jenis pelayanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasa	6 jenis	29.945	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah jenis pelayanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasa	6 jenis	29.945	
29)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah layanan penanganan Kasus Perempuan korban kekerasan	2 keg	191.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah layanan penanganan Kasus Perempuan korban kekerasan	2 keg	191.800	
9	Program Peningkatan	Kabupaten Kebumen	Cakupan Program	14,26%	12.919	Program Peningkatan	Kabupaten Kebumen	Cakupan Program	14,26%	12.919	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Kualitas Keluarga		Peningkatan Kualitas Keluarga			Kualitas Keluarga		Peningkatan Kualitas Keluarga			
13	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 keg	12.919	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 keg	12.919	
30)	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK TKI) tingkat Kecamatan dan Desa yang terfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Pidana Perdagangan Orang	4 kelompok	12.919	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK TKI) tingkat Kecamatan dan Desa yang terfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Pidana Perdagangan Orang	4 kelompok	12.919	
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		'Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data	100%	30.134	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		'Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data	100%	30.134	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Pilah Gender dan Anak					Pilah Gender dan Anak			
14	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	30.134	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	30.134	
31)	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah dokumen informasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupate	1 dok	30.134	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah dokumen informasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupate	1 dok	30.134	
11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Kebumen	'Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	madya	198.739	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Kebumen	'Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	madya	198.739	
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	3 keg	102.607	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Kabupaten Kebumen	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	3 keg	102.607	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
32)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	'Jumlah desa yang membentuk Forum Anak Desa.	52 desa	102.607	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	'Jumlah desa yang membentuk Forum Anak Desa.	52 desa	102.607	
16	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kebumen	Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 keg	96.132	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kebumen	Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 keg	96.132	
33)	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anakbagi Lembaga	Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen	Jumlah KPAD/K yg terfasilitasi,	52 kelompok	96.132	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anakbagi Lembaga	Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen	Jumlah KPAD/K yg terfasilitasi,	52 kelompok	96.132	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Penyedia Layanan Peningkatan KualitasHidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyedia Layanan Peningkatan KualitasHidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a					
12	Program Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Kebumen	Cakupan Perlindungan Anak	100%	267.479	Program Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Kebumen	Cakupan Perlindungan Anak	100%	267.479	
17)	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 keg	10.000	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Kabupaten Kebumen	'Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	1 keg	10.000	
34)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah paket Konseling Informasi Edukasi (KIE	1 paket	10.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah paket Konseling Informasi Edukasi (KIE	1 paket	10.000	
18	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Kabupaten Kebumen	'Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2 keg	256.479	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Kabupaten Kebumen	'Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2 keg	256.479	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
35)	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah jenis pelayanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	6 jenis	51.014	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah jenis pelayanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	6 jenis	51.014	
36)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah pendampingan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2 keg	206.465	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah pendampingan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2 keg	206.465	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.608.704	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.608.704	
19	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	8 dokumen	113.552	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	8 dokumen	113.552	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	kinerja perangkat daerah		perangkat daerah yang tersusun			kinerja perangkat daerah		perangkat daerah yang tersusun			
37)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 Dokumen	82.948	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 Dokumen	82.948	
38)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dok	30.604	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dok	30.604	
62	administrasi keuangan perangkat daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.870.444	administrasi keuangan perangkat daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.870.444	
20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	29 Orang	3.793.656	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	29 Orang	3.793.656	
39)	pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	8 dok	76.788	pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	8 dok	76.788	
40)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	223.657	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	223.657	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
41)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	9.017	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	9.017	
42)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	49.011	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	49.011	
43)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	23.925	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	23.925	
44)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan perundang undangan	2 dok	2.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan perundang undangan	2 dok	2.000	
45)	Penyediaan Bahan/Material	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bulan	31.580	Penyediaan Bahan/Material	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bulan	31.580	
46)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	120 kali	85.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	120 kali	85.000	
47)	Penata usahaaan arsip dinamis pada SKPD	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan operasional penanganan arsip	12 bulan	23.124	Penata usahaaan arsip dinamis pada SKPD	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan penyediaan operasional penanganan arsip	12 bulan	23.124	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah	12 bulan	143.721	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah	12 bulan	143.721	
48)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bula	2.079	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bula	2.079	
49)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	89.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	89.400	
50)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	52.242	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	52.242	
51)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77 unit	207.330	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77 unit	207.330	
52)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52 unit	145.067	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52 unit	145.067	

No.	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
						Operasional atau Lapangan					
53)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	21 unit	12.263	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	21 unit	12.263	
54)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	4 unit	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	4 unit	50.000	
23	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	38 org	50.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	38 org	50.000	
55)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	38 org	50.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DINAS SOSIAL P3A	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	38 org	50.000	

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah didiskusikan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tujuannya adalah melakukan penyelarasan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan. Dalam Forum OPD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.

Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran serta berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilaksanakan, hal ini menyebabkan mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari masyarakat untuk Tahun 2021 dalam artinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi ketersediaan anggaran serta peraturan perundangan yang berlaku.

Table 2.19
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 Kabupaten Kebumen

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Rehabilitasi sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	kecamatan klirong, pejagoan dan petanahan (Kecamatan Klirong, Pejagoan, dan Petanahan, Kab. Kebumen, Petanahan, Jogomertan)	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	10 orang	
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Desa Jabres RT 2 RW 2 Kecamatan Sruweng, Kab. Kebumen, Sruweng, Jabres	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	1 orang	
3	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kebumen	Jumlah kelompok organisasi wanita (GOW/DWP) yang mendapat fasilitasi raker, sosialisasi dan pelatihan	40 org istri anggota DPRD	Istri anggota DPRD

Table 2.20
Usulan masyarakat

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi TAPD	Status
27-01-2021	WARIS	Kepala Desa Pesuningan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan kesehatan remaja	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/penyuluhan Triat KRR	Desa Pesuningan, Kab. Kebumen, Prembun, Pesuningan	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan Koefisien : 100 Orang Anggaran : 10000000	renja	0	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Layak untuk didanai Koefisien : 100 Orang Anggaran : 10.000.000	usulan di Sesuaikan dengan kemampuan OPD	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
27-01-2021	WAKIJO	Kepala Desa Patukrejo	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), Pertemuan Pokja Kampung KB, Tribina, lokakarya Mini Kampung KB	Desa Patukrejo, Kab. Kebumen, Bonorowo, Patukrejo	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan OPD Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 22.583.520	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Usulan berdasarkan hasil Musrenbangcam Tahun 2020 Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 22.583.520	kegiatan di kampung KB sesuai dengan Juknis BOKB	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
27-01-2021	HERUSUPRIYANTO	Kepala Desa Kabekelan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan kesehatan remaja	Terpenuhinya Kegiatan Triad KRR Kesehatan Reproduksi Remaja	Kelompok Rebana Al Ghassani Desa Kabekelan, Kab. Kebumen, Prembun, Kabekelan	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan untuk diakomodir Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10000000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Layak untuk didanai Koefisien : 1 Paket Anggaran : 10.000.000	usulan di Sesuaikan dengan kemampuan OPD	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengu sul	Profil	Urusan	Usulan	Permasa lahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomend asi Mitra Bappeda	Kateg ori Usulan	Koefi sien	Rekomen dasi Kelurahan/Desa	Rekomenda si Kecamatan	Rekom endasi SKPD	Rekomen dasi TAPD	Status
27-01-2021	SADAT PURNOMO, S.Si	Kepala Desa Bonorowo	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Penyuluhan Pernikahan Dini, Bahaya Narkoba, Stunting, dan Kampung KB	Desa Bonorowo, Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : agar dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan OPD Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 23.000.000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Usulan berdasarkan hasil Musrenbang cam Tahun 2020 Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 23.000.000	usulan diSesuaikan dengan kemampuan OPD dan Juknis BOKB	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
27-01-2021	SODIKUL ANWAR	Kepala Desa Mulyosri	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Pemutaran Film Program KKBPK	Desa Mulyosri, Kab. Kebumen, Prembun, Mulyosri	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Anggaran dipertimbangkan, disesuaikan kebutuhan Koefisien : 1 unit Anggaran : 239.050.000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Layak untuk di danai Koefisien : 1 unit Anggaran : 239.050.000	rekomen dasi di terima : untuk pemutaran film , dana yang tersedia (1 x pertemuan Rp 400.000)	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
27-01-2021	SODIKUL ANWAR	Kepala Desa Mulyosri	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan kesehatan remaja	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan TRIAT KRR	Desa Mulyosri, Kab. Kebumen, Prembun, Mulyosri	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan Koefisien : 100 Orang Anggaran : 10000000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Layak untuk di danai Koefisien : 100 Orang Anggaran : 10000000	usulan Sesuai dengan kemampuan OPD	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi TAPD	Status
27-01-2021	HARTO	Kepala Desa Balorejo	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), Pertemuan Pokja Kampung KB, Tribinia, Lokakarya KB, Tribina, Lokakarya Mini Kampung KB	Desa Balorejo, Kab. Kebumen, Bonorowo, Balorejo	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan OPD Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 22.583.520	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Usulan berdasarkan hasil Musrenbang cam Tahun 2020 Koefisien : 1 Tahun Anggaran : 22.583.520	kegiatan di kampung KB sesuai dengan Juknis BOKB	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
27-01-2021	PURWANTO	Kepala Desa Kretek	Sosial	Fasilitasi kelompok rentan	Terlaksananya pelatihan dan penguatan penyandang difabel	Desa Kretek, Kab. Kebumen, Rowokele, Kretek	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : - Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : No rangking : 66 rab dan proposal blm dibuat mohon kegiatan dapat diwujudkan koefisiensi : 1 paket anggaran : 5000000 Koefisien : 1 paket Anggaran : 5000000	tidak diterima, karena Dinsos PPKB fokus pada penanganan PMKS terlantar (SPM)	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi TAPD	Status
27-01-2021	PARYOTO	Kepala Desa Ayah	Sosial	Fasilitasi kelompok rentan	Pembangunan tempat penampungan pengungsi di Bukit Tulangan	Desa Ayah, Kab. Kebumen, Ayah, Ayah	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : dipertimbangkan sesuai kebutuhan, tempat pengungsian seperti apa yg diusulkan. Jika berbentuk bangunan tidak dapat dilaksanakan di atas tanah Desa karena merupakan kewenangan Desa. Koefisien : 1 unit Anggaran : 75.000.000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :		tidak diterima ,karena dinsos menyed iakan penampungan yang bersifat sementara berupa tenda2	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
27-01-2021	TRI FAMUJI	Kepala Desa Plempukan Kembaran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Pemutaran film Program KKBPK	Desa Plempukan Kembaran , Kab. Kebumen, Ambal, Plempukan Kembaran	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Diperhitungkan dengan keuangan OPD Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 23905000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Disetujui Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 23905000	rekomendasi diterima : rekomendasi untuk pemutaran film, dana yang tersedia (1 x pertemuan film Rp	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi TAPD	Status
													400.000)		
28-01-2021	TASHI DIN S.Pd.I	Kepala Desa Sitibentar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Pencanaan kampung KB	Desa Sitibentar, Kab. Kebumen, Mirit, Sitibentar	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan dengan keuangan OPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 20.000.000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : - Koefisien : 1 paket Anggaran : 20.000.000	pencanaan Kampung KB dilaksanakan tanpa anggaran fisik dan seremonial	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
28-01-2021	AKHM AD	Kepala Desa Sarwogadung	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Pencanaan Kampung KB	Desa Sarwogadung, Kab. Kebumen, Mirit, Sarwogadung	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan dengan keuangan OPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 20000000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : - Koefisien : 1 paket Anggaran : 20000000	pencanaan Kampung KB dilaksanakan tanpa anggaran fisik dan seremonial	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
28-01-2021	JUMIRAN	Kepala Desa Tlogodepok	Sosial	Bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia potensial	Terpenuhinya bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia potensial	Desa Tlogodepok, Kab. Kebumen, Mirit, Tlogodepok	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan dengan keuangan OPD Koefisien : 15 orang Anggaran : 27000000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : - Koefisien : 15 orang Anggaran : 27000000	tidak diterima, usulan tidak ada di permen dagri 90	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi TAPD	Status
28-01-2021	KEBONSARI_PETA NAHAN	Kepala Desa Kebonsari	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Kampung KB yang melaksanakan program KKBPK	Desa Kebonsari, Kab. Kebumen, Petanahan, Kebonsari	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 22.580.000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Usulan sesuai dan dapat dilanjutkan Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 22850000	kegiatan di kampung KB sesuai dengan Juknis BOKB	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
28-01-2021	MULIM SIDIK	Kepala Desa Setrojenar	Sosial	Fasilitasi kelompok rentan	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel (penyandang cacat)	Desa Setrojenar, Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan menyesuaikan kemampuan keuangan OPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50.000.000	non_renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : - Koefisien : 100 Paket Anggaran : 50000000	tidak diterima, karena Dinsos PPKB fokus pada penanganan PMKS terlantar (SPM)	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
28-01-2021	MUHAMMAD KHARISUN	Kepala Desa Buluspesantren	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Kampung KB yang melaksanakan Program KKBPK	Desa Buluspesantren, Kab. Kebumen, Buluspesantren, Buluspesantren	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan menyesuaikan kemampuan keuangan OPD Koefisien : 1 Desa Anggaran : 22583520	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :		- tidak diterima : desa Buluspesantren belum terbentuk kampung KB kegiatan di kampung KB	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi TAPD	Status
													di sesuaikan dengan Juknis BOKB		
28-01-2021	TEGUH SUKARMAN, S.E	Kepala Desa Padureso	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan Kampung KB	Desa Padureso, Kab. Kebumen, Padureso, Padureso	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan, diperjelas usulan, karena usulan kegiatan berupa penyediaan perlengkapan jalan Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Hasil Musrenbang cam mendapat peringkat 26 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	- tidak diterima : desa padureso belum terbentuk kampung kb 'kegiatan di kampung KB di sesuaikan dengan Juknis BOKB	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
28-01-2021	MUH HASANUDIN	Kepala Desa Aditirto	Sosial	Bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia potensial	Pemberian Bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia	Desa Aditirto, Kab. Kebumen, Pejagoan, Aditirto	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Dipertimbangkan mengoptimalkan anggaran Desa Koefisien : 50 Orang Anggaran : 1800000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :		tidak diterima, usulan tidak ada di permen dagri 90	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi TAPD	Status
28-01-2021	DALMO	Kepala Desa Gebangsa ri	Sosial	Bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia potensial	Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia potensial	Desa Gebangsa ri, Kab. Kebumen, Klirong, Gebangsa ri	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Persiapkan data penerima BNBA dari DTKS Koefisien : 70 KK Anggaran : 126000000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : Prioritas usulan ke dinsos PPKB, Persiapkan data penerima BNBA dari DTKS Koefisien : 70 KK Anggaran : 126000000	tidak diterima, usulan tidak ada di permen dagri 90	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD
31-01-2021	TEGUH BUDI PRAYOGA	Kepala Desa Karangtengah	Sosial	Bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia potensial	Terbantu nya masyarakat kurang mampu dengan adanya usaha ekonomi produktif	Desa Karangtengah, Kab. Kebumen, Poncowarno, Karangtengah	Dinas Sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rekomendasi : Diperhitungkan dengan keuangan OPD Koefisien : 40 KK Anggaran : 72000000	renja		Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Rekomendasi : masuk musrenbang cam rangking 52 Koefisien : 40 KK Anggaran : 72000000	tidak diterima, usulan tidak ada di permen dagri 90	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Diteruskan ke Forum SKPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Mengacu pada amanat Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai pedoman pembangunan Negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dan visi, misi dan program Presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatrabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pada 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 PERPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah menegaskan fokus penanganan pandemi *Covid-19* meliputi penanganan wabah *Covid-19*, Program Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak. Adanya Refocusing dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 terutama untuk urusan refocusing belanja tidak tetap dan refocusing bantuan sosial.

Provinsi Jawa Tengah telah membentuk satuan koordinasi wilayah (satkorwil) untuk percepatan penanganan *Covid-19*. Enam satkorwil telah dibentuk di enam eks karesidenan, yaitu wilayah Pati, Semarang Raya, Pekalongan, Banyumasan, Kedu dan Solo. Ranah kerja satkorwil yakni melakukan sinkronisasi, koordinasi serta percepatan penanganan *Covid-19* di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain itu, satkorwil ini juga difungsikan untuk penanggulangan dampak sosial, ekonomi maupun Kesehatan.

Untuk menanggulangi dampak pandemi virus corona (*Covid-19*) Jawa Tengah mengandalkan konsep Jogo Tonggo (jaga tetangga). Karena semua jadi korban atau terkena dampak Covid-19, namun karena anggaran kurang, maka dibutuhkan toleransi dan teposeliro, yang mampu ikut membantu yang tidak mampu dan saling gotong royong.

Memperhatikan perkembangan kasus *Covid-19* di Kabupaten Kebumen, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus *Covid-19* telah melakukan pengkajian kasus dan Analisa data. Dari hasil kajian tersebut telah ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sebagai upaya paling efektif. Namun upaya-upaya tersebut akan berhasil sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan tersebut sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Covid-19* di Kabupaten Kebumen.

Di Kabupaten Kebumen, semua kegiatan yang dihentikan akibat *Covid-19* akan dialihkan pada APBD Perubahan. Selain itu, juga dilakukan rasionalisasi anggaran secara menyeluruh dengan menyesuaikan regulasi dari pusat dalam penanganan *Covid-19*. Untuk Jaring Pengaman Sosial KK Miskin atau yang terdampak *Covid-19*.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
7. Melakukan revolusi karakter bangsa;
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dan difokuskan pada capaian sasaran pembangunan daerah, serta mempunyai tingkat kemendesakan dan daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan melalui evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun rencana.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Maka prioritas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung 2 misi yaitu Misi ke 2 dan Misi ke 3 Kebumen Tahun 2021-2026, yaitu: "Misi ke 2 Peningkatan aksesibilitas dan kuantitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, dan misi ke 3 adalah mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan".

Kemiskinan di Kabupaten Kebumen sampai tahun 2020 sebesar 17,59%, angka ini bila dibandingkan dengan target RPJMD 2016-2021 sudah diatas target, dimana target RPJMD tahun 2020 sebesar 16,22%. Namun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di Kabupaten tetangga, Jawa Tengah dan Nasional angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen tercatat paling tinggi se-Jawa Tengah. Beberapa upaya telah dilakukan Kabupaten Kebumen untuk menekan angka kemiskinan namun butuh usaha lebih keras di tahun 2021-2025 untuk mengatasi kemiskinan di Kebumen.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Misi		Tujuan		Sasaran	
	Misi		Tujuan			
1	Misi 2 :	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Tujuan 2.1	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sasaran 2.1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
2	Misi 3 :	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan	Tujuan 3.2	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Sasaran 3.2.1	Berkurangnya penduduk miskin

Adapun Prioritas arah tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Prioritas arah tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

No	Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator	Target kinerja tujuan / sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Misi 2 :	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya						
1	Tujuan 2.1	Meningkatkan kulitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia					
	Sasaran 2.1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)					
		Program pengarusutamaan gerder dan pemberdayaan perempuan	Cakupan pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	14,26%	15,63%	16,99 %	18,38%	19,73%
		Program perlindungan perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Cakupan perlindungan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Program peningkatan kualitas keluarga	Cakupan program peningkatan kualitas keluarga	14,26%	15,63%	16,99 %	18,36%	19,72%
		Program pengelolaan system data gender dan anak	Cakupan program pengelolaan system data pilah gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
		Program pemenuhan Hak anak (PHA)	Kategori Kabupaten layak anak (KLA)	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
		Program perlindungan khusus anak	Cakupan perlindungan anak	100%	100%	100%	100%	100%
	Misi 3:	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan						
2	Tujuan 3.2	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Indeks gini					
	Sasaran 3.2.1	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat kemiskinan					
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Program pemberdayaan sosial	Persentase peningkatan kemampuan SDM kesos	69%	70%	71%	72%	73%
		Program penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan	Prosentase penanganan warga Negara migran korban tidnak kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator	Target kinerja tujuan / sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS si luar panti kewenangan kabupaten yeng tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase dokumen data kemiskinan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 mencakup 2 urusan, 13 program, dan 23 kegiatan yang terdiri dari 55 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Program	No	Kegiatan/sub kegiatan
I	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
1	Program pemberdayaan sosial	1	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota 1) Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota 2) Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota 3) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
2	Program penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan	2	Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan di desa/kelurahan asal 4) Fasilitasi pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal
3	Program Rehabilitasi sosial	3	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 5) Penyediaan permakanan 6) Penyediaan sandang 7) Penyediaan alat bantu 8) Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 9) Pemberian layanan data dan pengaduan 10) Pemberian layanan kedaruratan
		4	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial 11) Pemberian layanan data dan pengaduan 12) Penyediaan permakanan 13) Penyediaan sandang 14) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
			15) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota
4	Program perlindungan dan jaminan sosial	5	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota 16) Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

No	Program	No	Kegiatan/sub kegiatan
I	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
			17) Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
5	Program penanganan bencana	6	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
			18) Penyediaan makanan
			19) Penyediaan sandang
			20) Penyediaan tempat penampungan pengungsi
			21) Penanganan khusus bagi kelompok rentan
			23) Pelayanan dukungan psikososial
		7	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota
			24) Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana
25) Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana			
6	Program pengelolaan taman makam pahlawan	8	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
			26) Pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
Urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			
7	Program pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan	9	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lambaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
			27) Sosialisasi kebijakan pelaksaan PUG termasuk PPRG
		10	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum sisal dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota
			28) Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatanpartispasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi
8	Program perlindungan perempuan	11	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkungan daerah kabupaten / kota
			29) Koordinasi dan sinkronisasi pelakaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuna lingkup daerah kabupaten/kota
		12	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
			30) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota
			31) Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota
9	Program peningkatan kualitas keluarga	13	Peningkatan kualiatas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan anak tingkat daerah kabupaten/kota

No	Program	No	Kegiatan/sub kegiatan
I	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
		32)	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota
10	Program pengelolaan system data gender anak	14	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota
		33)	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota
11	Program pemenuhan hak anak (PHA)	15	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
		34)	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
		16	Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
		35)	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota
12	Program perlindungan khusus anak	17	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkungan daerah kabupaten/kota
		36)	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
		18	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
		37)	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
		38)	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten /kota
13	Program penunjang urusan pemerintah daerah	19	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			39) Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah
			40) Evaluasi kinerja perangkat daerah
		20	Administrasi keuangan
			41) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
			42) Pelaksanaan penatausahaan dan oengujian/verifikasi keuangan SKPD
		21	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
			43) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		44)	Penyediaan bahan logistik kantor

No	Program	No	Kegiatan/sub kegiatan
I	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
		45)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		46)	Penyediaa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		47)	Penyediaan bahan/material
		48)	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		49)	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
		22	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		50)	Penyediaan jasa surat menyurat
		51)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik
		52)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		23	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
		53)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinana kendaraan dinas operasional dan lapangan
		54)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		55)	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

a. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

No	indikator	satuan	Kondis awal		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Kemiskinan	%	17,59	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,0-14,00	13,00-13,0

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD

No	Urusan	indikator	Satuan	Kondis awal		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sosial	Persentase capaian SPM sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100

b. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain usulan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten di Kebumen:

Tabel 3.6
Pencapaian SDGs

No	Kode Indikat or	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Kategori Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Baseline (2015)	Tahun 2020		Kendala/Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan	OPD Penanggung Jawab
									Target	Realisasi Sem 1				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(18)	(19)	(22)	(23)	(24)	(25)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN														
4	1.3.1 (c)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat ; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Persentase penyandang disabilitas miskin	Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan renta yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas /Jumlah penyandang disabilitas miskin	Indikator Proxy	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	%	30,75%	100%	19,48%	validitas data	verval data		Dinsos PPKB

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Kategori Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Baseline (2015)	Tahun 2020		Kendala/Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan	OPD Penanggung Jawab
									Target	Realisasi Sem 1				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(18)	(19)	(22)	(23)	(24)	(25)
5	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	Indikator Sesuai	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	KPM	29.758	58.016	63.016	Belum semua Pendamping mampu memberikan motivasi untuk meningkatkan kapasitas KPM, termasuk melaksanakan pendampingan dalam konteks pekerjaan sosial terhadap KPM ; Pemberdayaan KPM yang masih sedikit	Penguatan kapasitas dan kemampuan SDM PKH melalui pelatihan/ diklat ; - Pelatihan dan pemberian modal bagi KPM PKH agar bisa segera graduasi		Dinsos PPKB
8	1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang	CPR/ Peserta KB Aktif	Cakupan Peserta KB aktif	Indikator Proxy	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk	%	59,90%	65%	71,00%	target terlalu tinggi, target nasional 63,93%	menurunkan target		Renstra Dinsos PPKB

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Kategori Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Baseline (2015)	Tahun 2020		Kendala/Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan	OPD Penanggung Jawab
									Target	Realisasi Sem 1				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(18)	(19)	(22)	(23)	(24)	(25)
		berstatus kawain				40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.								
25	3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Indikator Proxy	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Indek			-	-	kabupaten tidak menghitung	-	Dinsos PPKB
26	3.7.2 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Cakupan Peserta KB aktif	Indikator Proxy	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	KK	42.634	38.118	44.843	karena adanya pandemi covid-19 jadi pelayanan di batasi sehingga lebih banyak menggunakan non MKJP	tetap Ber - KB menggunakan non MKJP dan invent Harganas yang biasanya dilakukan secara seremonial untuk saat ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan		Renstra Dinsos PPKB

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Kategori Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Baseline (2015)	Tahun 2020		Kendala/Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan	OPD Penanggung Jawab
									Target	Realisasi Sem 1				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(18)	(19)	(22)	(23)	(24)	(25)
												KB serentak sejuta akseptor pada tanggal 29 juni 2020		
5	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	-	-	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	%	1.27%	-	-		kabupaten tidak menghitung		Dinsos PPKB
9	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Unmet need KB	Cakupan Peserta KB aktif	Indikator Proxy	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9%	KK	51.127	Dibawah 10%	57.447	banyak KK PUS yang merantau keluar Kebumen	Penyediaan Lapangan Kerja (Lintas Sektor)		Renstra Dinsos PPKB

No	Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Kategori Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Baseline (2015)	Tahun 2020		Kendala/Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan	OPD Penanggung Jawab
									Target	Realisasi Sem 1				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(18)	(19)	(22)	(23)	(24)	(25)
10	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Cakupan Peserta KB aktif	Indikator Sesuai	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	%	74%	65%	71%	-	sudah tercapai		Renstra Dinsos PPKB

- Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan di Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan peralatan pengolahan tawon Madu Klanceng diberikan kepada 50 kk,
- Pemberian bantuan pelatihan Pengolahan Susu Kedelai kepada 55 orang lanjut usia
- Bantuan untuk orang kehabisan bekal 86 jiwa
- Bantuan permakanan untuk Rusi Dosaraso sebanyak 120 jiwa
- Pemberian bantuan alat kesehatan kepada penyandang disabilitas sebanyak 287 orang
- Pemberian pelatihan kepada anak terlantar sebanyak 130 orang
- Pemberian bantuan pelatihan Pengolahan Ubi Kayu kepada WRSE sebanyak 30 orang

Bantuan sosial diberikan kepada warga miskin yang masuk data terpadu kesejahteraan social (DTKS). Pemberian tersebut berdasarkan proposal dari masyarakat yang selanjutnya sudah dilakukan kajian dan survey. Dan di tahun 2020 dilaksanakan pendampingan bagi KUBE oleh 28 orang pendampingan.

- Pencapaian SPM

Table 3.7
Capaian SPM Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi krban bencana kabupaten/kota	100%	100%

Note: Jumlah PMKS terlantar di luar panti dan korban bencana tidak bisa di prediksi dalam angka, sehingga ketika ditemukan PMKS terlantar di luar panti dan korban bencana diberikan pelayanan maka dinyatakan 100%.

- Pencapaian IKU OPD

Tabel 3.8
Capaian indikator kinerja utama OPD tahun 2020

Indikator kinerja	Satuan	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020
Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%	16,20	96,12
Persentase cakupan peserta KB aktif	%	85,10	70,60
Persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera	%	32,37	44,04

- c. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Pada tahun 2022 menurut SOTK baru Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Kebumen akan melaksanakan 2 urusan pembangunan yaitu Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni urusan pemerintahan bidang sosial dan Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rumusan program dan kegiatan tahun 2022 terdiri dari 2 urusan 13 program 23 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp 12.333.223.000,-

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kabupaten Kebumen dan melingkup Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.

Pagu indikatif menurut sumber pendanaan: DAK Non Fisik sebesar Rp 450.455.000,- dan DAU sebesar Rp 11.882.768.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020, membawa dampak yang signifikan terhadap rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Target, prioritas dan sasaran yang telah direncanakan memerlukan penyesuaian atau perubahan.

Rumusan rencana Program dan Kegiatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

Table 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah tahun anggaran 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Data Terlampir)

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026. Selain berlandaskan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 dan RKPD 2021, Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen serta peran aktif *stakeholder* Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kebumen,
KEPALA DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

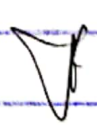
BAB V PENUTUP

Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026. Selain berlandaskan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 dan RKPD 2021, Renja Dinas Sosial dan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen serta peran aktif *stakeholder* Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kebumen,
KEPALA DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Umi Hajarohun	

**FORMAT
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (Oleh Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 23 Februari 2021
Jam : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Aula Integritas Inspektorat
Jl Arungbinang No 16 Kebumen

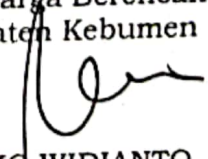
Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021

MENYEPAKATI

- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

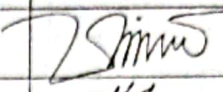
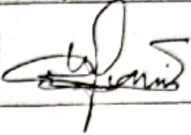
Demikian berita acara ini dibuat dan disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 23 Februari 2021
Pimpinan Sidang
Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen

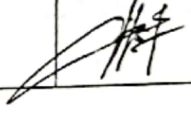

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1		DPRD*		
2	Azida Nurul Hayya, S.STP, M.Si	Unsur BAPPEDA	BAPPEDA	
3	Dalikon	Unsur Perangkat Daerah	Dispermades P3A	
4	Irsono, S.ST	Unsur Kecamatan	Kecamatan Kutowinangun	
5	Sri Murwani, S.Sos	Unsur Masyarakat/LSM	LKS Putra Manunggal Gombang	

Delegasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
pada Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Dalikon	Dispermades P3A	Dispermades P3A	

TANGGAL
KEGIATAN
TEMPAT

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM OPD TA 2021

: 23 Februari 2021
: Rapat Forum OPD TA 2021
: Aula Integritas Inspektorat
Jl. Arungbinang no. 16 Kebumen

SUMU

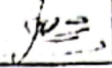
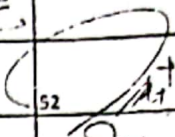
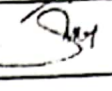
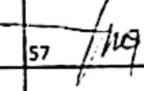
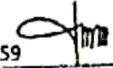
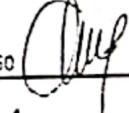
NO	NAMA	L/P	INSTANSI/ORGANISASI	NO HP	TANDA TANGAN	
1	Eko Widianto	L	Dinas PPKB		1	35.8
2	Ila Faturrahman	P	IPKKB	081808650818	2	35.9
3	Finando	L	Dinas PPKB		3	
4	Sekya Birawa	L	Dinas PPKB	08939760142	4	35
5	Makawu	L	Dinas PPKB	082135995250	5	35
6	M. Anwerudin	L	1.	08773781351	6	35
7	A. Harun	L	Inspektorat	087737739505	7	
8	Mispani	P	Dinas PPKB	089520043447	8	35.7
9	M. Syah	L	Dinas PPKB	081327722004	9	35.6
10	Suroso	L	Dinas PPKB	081327722004	10	35.7
11	Heng K.	P	Dinas PPKB	081327722004	11	35.5
12	Sri Purmitarani	P	Dinas PPKB	087837875333	12	35.9
13	Teguh Sarwiyon	L	KEMENAG	085244528425	13	35.7
14	IKA KUMAS	P	Dinas	08101754454	14	35.
15	Sunarto	L	PKH	082242256789	15	36
16	Muri K	L	PKH	082242256789	16	35.7.
17	Fuad U	L	Pektor	085634306046	17	36
18	Sutarso	L	MNSOSPPKB	081327084343	18	35.5
19	DAEMONO		TABANA	08232628886	19	35.8
20	Sabar R	L	Dinas	081804375	20	35.5
21	Enggur W	P	IPKKB	081327577561	21	35.59
22	Hj. Anisah Yusuf	P	Muslimat	085201965750	22	35.7
23	Jugay	L	ICcc. Regi	08773233520	23	35.3
24	KUS HARYONO	L	BPS Kebumen	085635601510	24	35.4
25	Muhammad Fikri	L	Gerbakan	08131788818	25	36.0

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	I/P	INSTANSI/ORGANISASI	NO HP	TANDA TANGAN	
26	Dollikun	L	Dispermuda (P)	081325084666	26	35,4
27	Wahid	L	-IKIP	081325308281	27	36,4
28	Endra. W	L	BPKAD	081328986441	28	35,7
29	Samijun	L	Dinas + PPS		29	36,2
30	Herriyati	P	Aisyiah	027715118027	30	36.
31	Wulan Diani S	P	TAGANA	087737760420	31	35,3
32	Mury	L	Indah		32	35,9
33	Nurdjanda	L	Dmhrs	08122028308	33	35,8
34	Si Munawani	P	Panti PM	082137457115	34	35,7
35	Iswatringgh	P	Dinsos PPKB	0815777898	35	35,1
36	Dian	P	Dinas PPKB	081380662144	36	35,1
37	Agi	P	Bappor		37	35,1
38	Irfah	L	Kutawinaya		38	35
39	Belma	P	Dinas PPKB	082133652220	39	36
40	Vita Kurnia	P	Dinas PPKB		40	
41	Sulcamto	L	Inspektorat		41	
42	Ngadmini	P	Inspektorat		42	
43	Parsito	L	Inspektorat		43	
44	Adi Pandaya	L	Inspektorat		44	
45	Wendradi	L	Dinas PPKB		45	
46	Dinarini	P	Slap		46	
47	Alhaeni	L	Slap		47	
48	En Rahayu	P	Kluayan	081328690240	48	
49	Mulyani				49	
50	Siti Huzatimah				50	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	L/P	INSTANSI/ORGANISASI	NO HP	TANDA TANGAN
51	Gusni	i	Dinas PPKB		51 
52	Purwati	L	Inspektoral		52 
53	Beni	L	Inspektoral		53 
54	Titi Syarifahul	P	Dinas PPKB		54 
55	Ajeng O	P	Dinas PPKB		55 
56	Inara Astuti	P	Kec. Kebumen		56 
57	Sri Srukanti	P	Kec. Pejagaden		57 
58	Sigit Purwanto	L	Kec. Kebumen		58 
59	Dhani	P	TKSK		59 
60	Iyotam	L	Tagana		60 

Mengetahui,
Selaku PPTK

Dra. BETANA

NIP. 19640610 199003 2 006

NOTULEN
FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KAB KEBUMEN

Hari/tanggal : Selasa, 23 Februari 2021

Waktu : Pukul 08.30 s/d selesai

Tempat : Aula Integritas Inspektorat Kab. Kebumen
Jl. Arungbinang No 16 Kebumen

I. SUSUNAN ACARA

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Indonesia Raya
3. Do'a
4. Pembacaan tata tertib
5. Sambutan pengarahannya oleh Kepala Dinas Sosial dan PPKB
6. Diskusi dan Tanya jawab
7. Pemilihan Delegasi Forum OPD pada Musrenbang RKPD Kab. Kebumen Tahun 2021
8. Penandatanganan Berita Acara Forum OPD
9. Penutup

II. LAPORAN PENYELENGGARA OLEH SEKRETARIS DINSOS PPKB, KINANTO, S.IP

1. Dasar Penyelenggaraan Forum
 - Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pemendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
 - Pemendagri 70 Tahun 2019 Tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 - Surat Edaran Gubernur Nomor 050/0001248 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jateng Th.2022
 - Surat Edaran Sekda Kab. Kebumen Nomor 050/051 Tanggal 10 Januari 2020 tentang Arah Kebijakan Pembangunan dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan RKPD Kab. Kebumen Th. 2022 serta upaya pemuliahan dampak pandemi Covid-19
2. Maksud dan tujuan diselenggarakannya Forum OPD Dinas Sosial dan PPKB tahun 2021 adalah untuk penyempurnaan rencana kerja Dinas Sosial dan Tahun 2022.
3. Narasumber : Kepala BAP3DA, dan Kepala BPKAD, Inspektur Kabupaten Kebumen
4. Peserta : 100 orang, 50 orang hadir, 50 orang mengikuti secara virtual yang terdiri dari :
 - Unsur Komisi B DPRD
 - Unsur BAP3DA
 - Dinas / Bidang / Bagian dan instansi terkait
 - Camat se-Kab. Kebumen
 - Pejabat Struktural Dinsos PPKB
 - Ormas / LSM terkait
5. Waktu dan tempat pelaksanaan : 1 (satu) hari, Selasa, 23-2-2021 di Aula Integritas Inspektorat Kab. Kebumen

III. Sambutan Sekaligus Paparan Rancangan Rencana Kerja Dinsos PPKB Tahun 2021 Oleh Kepala Dinsos PPKB, Drs. Eko Widiyanto.

Materi Paparan :

1. Rencana Kerja Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen Tahun 2021, terdiri dari 2 urusan, 10 program, 23 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Dengan Pagu Indikatif Rp 26.270.495.000,-, terdiri dari pagu rutin Rp 1.568.986.000,-, DAK Non Fisik Rp 8.399.343.000,-, DAK Fisik Rp 1.469.042.000,-, Program Unggulan Rp 8.570.970.000,- Gaji dan Tunjangan Rp 4.693.612.000,- dan sasaran OPD Rp 1.568.542.000,-
2. Rencana kerja 2022 ada 2 urusan yaitu urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Untuk urusan pemerintahan bidang sosial terdiri dari 10 program yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdiri dari beberapa Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
3. Untuk Rencana anggaran 2022 pagu program pemberdayaan sosial Rp 377.719.000, Program penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Rp 20.000.000,- Program Rehabilitasi Sosial Rp 3.234.814.000, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 1.105.970.000, Program Penanganan Bencana Rp 1.860.879.000, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Rp 14.400.000, Program Pengendalian Penduduk Rp 210.000.000, Program Pimbinan Keluarga Berencana (KB) Rp 11.916.556.000, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Rp 1.267.366.000, dan Program Penunang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 6.262.791.000,.
4. Program Ungulan
Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti SosialProgram Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/KotaProgram Penanganan Bencana Alam
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/KotaProgram Keluarga Berencana
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

IV. PENGARAHAN NARASUBER

1. BAPPEDA – Azida Nurul Hayya, S.STP, M.Si

SPM yang terdapat di dinas Sosial tidak lepas dari program kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan rencana 2022. Dalam urusan Dinsos PPKB masuk dalam Misi Bupati nomor 2, Urusan Sosial masuk pada Misi nomor 3 terkait dengan hal tersebut Dinas Sosial menganut SPM dalam hal di pertanyakan bahwa apakah Program tersebut tepat sasaran.

Sejauh ini di Dinsos PPKB mengampu orang terlantar dan ODGJ, tapi apakah dapat mengampu semua PM itu dengan anggaran yang minim. Karena alokasi kita di tahun 2022 turun, Pagu anggaran yang sudah di sosialisasikan oleh Pemda menjadi target dalam melaksanakan Urusan Sosial dan Urusan PPKB.

Bapak Bupati terpilih memiliki beberapa program yang akan dilaksanakan di tahun 2022 salah satunya yaitu kartu kebumen sajahterah (KKS) dengan harapan semua masyarakat kurang mampu Kebumen terlayani, dan untuk kaum Disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial berupa alat bantu agar tepat sasaran sehingga tidak terjadi penumpukan alat bantu, hal tersebut bisa dimulai dengan pendataan Disabilitas.

Masih ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh Dinas Sosial dan PPKB dan Desa terkait dengan pemberantasan kemiskinan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara Dinsos PPKB memberikan data kemiskinan kepada Desa termasuk juga teman-teman di Desa untuk dapat menentukan mana yang mempunyai kriteria masuk pada golongan miskin dan sangat miskin. Sehingga kita mendapatkan data bahwa Kebumen masih termasuk Kabupaten miskin. Oleh karena itu kami meminta tolong untuk mencermati Renja agar sesuai dengan apa yang di rencanakan oleh Dinsos PPKB. Salah satu program yang disampaikan oleh Bupati terpilih adalah festival anggaran dengan tujuan untuk melakukan transparan ke publik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah program sudah tepat sasaran.

2. BPKAD – Endra W.

Untuk mengelola keuangan 2021 masuk masa transisi, Pendapatan kita masih tergantung pada pendapatan pemerintah daerah, dan hal tersebut membuat anggaran-anggaran di refocusing untuk penanganan pandemi.

Terkait gaji dan tunjangan perlu di perhatikan rincian perekening, dan perencanaan anggaran kas dilihat dari pemendagri no 70 tahun 2019 perlu diperhatikan, penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, bantuan-bantuan sosial diperhatikan aturan-aturan yang diatur Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk pengelolaan keuangan karena ada peraturan baru. Di tahun 2021 pendapatan yang dikelola 82,2% untuk pendapatan transfer hanya 12%. Untuk rekening Gaji dan belanja agar diperhatikan supaya pelaksanaannya menjadi mudah.

3. Kepala Dinas Sosial dan PPKB – Drs. Eko Widiyanto

Kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan target untuk tahun 2022 dan evaluasi kegiatan dari tahun sebelumnya.

V. Diskusi / Tanya Jawab

Pertanyaan

1. Dispermades P3A - Dalikun

Program dari Bupati terpilih yaitu tanpa kemiskinan. Tetapi masih ada beberapa hal yang mempengaruhi kemiskinan terutama di Kabupaten Kebumen antara lain:

- Masih Banyak Kepala Desa berpikir bahwa desa tersebut mendapatkan bantuan sebanyak-banyaknya sehingga ada manipulasi data;
- Masih banyak menemukan bahwa korban bencana semua biaya masih di tanggung Pemda karena untuk pengajuan di Baznas ada banyak persyaratan maka keluarga tersebut belum masuk di DTKS bagaimana Dinsos Sosial dan PPKB menangani pengakuratan data;
- Tingginya angka kekerasan Kab. Kebumen karena faktor kemiskinan karena anak-anak tinggal dengan kakek neneknya sehingga mereka kurang terurus;
- Koordinasi tentang bantuan yang menumpuk;

- Berharap untuk kedepannya Penggunaan 1 Basis data agar tidak ada penumpukan data;
 - Penanganan Anak Punk agar berkurang;
 - Cara mengatasi manipulasi data di Desa;
 - Cara mengatasi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran;
 - Bantuan Covid-19 agar dapat tepat sasaran bukan di bagi ratakan;
2. Inspektorat – A. Harun
- Dimohon untuk menindak lanjuti saran dan rekomendasi dari Inspektorat terkait dengan pencapaian SPM sehingga untuk tahun berikutnya pencapaian SPM agar tepat sasaran;
 - Agar bersama-sama kita mewujudkan 1 data dengan cara pengakuratan data;
 - Apabila ada kendala terkait dengan sasaran dan rekomendasi dari Inspektorat agar bisa disamakan, sehingga Inspektorat bisa lebih cepat membantu;
 - Terkait dengan Pengawasan inspektorat tidak sendiri;
 - Dalam Inspektorat melakukan monitoring-monitoring bantuan sosial masih adanya kendala dari pusat yaitu tentang data yang tidak 1 data base (1 data);
 - Pemeriksaan SPM untuk Dinsos PPKB tahun 2019, mohon untuk saran dan rekomendasinya agar ditindak lanjuti sebagai pedoman untuk tahun berikutnya;
 - Terkait data DTKS agar sebisa mungkin valid;
 - Untuk Semua Kegiatan yang sedang / akan berjalan supaya tidak timbul masalah, dimohon untuk melakukan pengawasan.
3. LKS Putra Manunggal Gombong - Sri Murwani, S.Sos
- Untuk penyandang disabilitas terbanyak adalah tuna grahita yaitu sebanyak 108 orang, oleh karena itu kami meminta bantuan untuk kehidupan sehari-hari, karena mereka perlu di bantu dari bangun tidur hingga tidur lagi dan kami juga meminta bantuan untuk diadakannya sosialisasi masyarakat;
 - Data dari hari kehari belum tercapai dengan bagus dari desa;
 - Adanya Kartu penyandang disabilitas sebagai program dari pusat, tetapi belum di usulkan karena belum terfasilitasi.
4. Tagana - Darmono
- Terkait rencana tali asih dari kabupaten agar direalisasikan;
 - Dengan adanya penanganan kebencanaan baru mendapatkan tali asih Rp. 250.000 dari Provinsi itu untuk triwulan;
 - Terkait Pembuatan BPJS Ketenagakerjaan mohon untuk di pertimbangkan.
5. ITMI – Budiono
- Bagaimana cara ITMI mendapatkan Alokasi APBD?

VI. Tanggapan

a. Kepala Dinas

1. Mengubah mainset masyarakat terhadap kemiskinan, agar masyarakat tidak mendapatkan double bantuan;
2. Kebumen termiskin bukan dari data tetapi dari hasil survey masyarakat yang dilakukan oleh BPS karena data yang di ambil dengan sampel dan sampel yang di ambil berpengaruh terhadap perhitungan kemiskinan di kebumen;
3. Menghindari hal yang tidak diinginkan kami sudah menyiapkan aplikasi dimana jika NIK dimasukan maka kita tau mereka dapat bantuan berupa apa saja (double bansos);

4. Untuk penerima PKH ketika KPM tersebut masih terdapat komponen ibu hamil anak sekolah, maka mereka masih berhak mendapatkan bansos tersebut, akan tetapi jika KPM tersebut sudah tidak termasuk dalam komponen PKH maka KPM tersebut bisa untuk di laporkan tidak menerima bansos tersebut;
5. Bukan satu data tumpang tindih, walaupun sudah mengadakan musyawarah desa tetapi karena memang adanya mainset bahwa semuanya didaftar dan semua masyarakat harus mendapat bansos tersebut;
6. Untuk Penanganan anak Punk, kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Satpol PP. Dalam hal tersebut kami melakukan penjemputan dan pemanggilan kepada orang tua yang bersangkutan. Dari hal tersebut jika kita hanya kembalikan ke keluarga maka mereka akan kembali lagi ke menjadi anak Punk, maka usaha kita adalah melakukan rehabilitasi selama 6 bulan dan kami juga meminta bantuan kepada masyarakat dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan;
7. Untuk masalah data dan kemiskinan yang menjadi satu pemikiran di Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten miskin bukan dari jumlah penduduk tetapi juga dari penilaian tertentu, karena tidak semua yang ada dalam permasalahan sosial itu bisa kita tangani;
8. Di tahun 2020 Dinsos melakukan pendataan terkait disabilitas di Kab. Kebumen, dari Perda no 9 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berusaha bekerjasama dengan balai besar penyandang disabilitas intelektual agar pada saatnya nanti mereka dapat mandiri dan mendapatkan Kartu disabilitas yang telah di update;
9. Untuk tali asih tagana akan kami usulkan.

b. BAPPEDA

1. Untuk kegiatan terkait dengan Tagana pagu indikatifnya tidak dihilangkan akan tetapi tidak di cantungkan di indicator kegiatan dan sub kegiatan
2. Terkait anak punk termasuk penanganan anak terlantar termasuk SPM tergantung bagaimana cara Dinsos PPKB merehabilitasi PM tersebut melalui bantuan Satpol PP dan bagaimana cara masyarakat peduli dengan hal tersebut.

c. BPS

Dinas sosial menangani kemiskinan mikro, BPS diminta membantu tentang Kemiskinan BLT dll, survei yang kita lakukan yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat, untuk BPS menggunakan kemiskinan yang absolut. Dalam pengambilan sampel telah di pilih dari berbagai kalangan. dalam pengambilan data petugas pendataan dikawal oleh BPS sehingga tidak ada kesalahan data.

d. Kemenag

Kementrian agama melalui penyuluh-penyuluh agama telah menyampaikan tentang bantuan orang miskin, dan akan tetapi untuk pihak desa apakah kepala desa berani atau tidak untuk bertindak tegas tentang hal tersebut. Karena sebenarnya masyarakat Kabupaten Kebumen tidak lah semua miskin harta, karna bisa dilihat dari pendaftaran Haji yang dilakukan setiap tahunnya. Jadi secara inti masyarakat bukan miskin harta melainkan miskin hati, perlu adanya penyuluhan keagamaan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan masalah hati terutama untuk masalah penerimaan bansos.

VII. PENUTUP

Notulen,



Wendradi Widi R